



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR
06 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja utama Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 C. i. D.)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 09 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Nomor 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Nomor 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Nomor 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Nomor 2011 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 58), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) IKU Pemerintah Daerah merupakan acuan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menyusun rencana strategis OPD;
 - b. menyusun rencana kinerja tahunan;

- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - e. melakukan evaluasi capaian kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Uraian IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2013
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 49 TAHUN 2013
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA
 PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR
 06 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KEF	
<i>Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu</i>					
1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	1	Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal maupun non formal	rasio	
		2	Jumlah daya tampung pendidikan dini (ruang kelas)	kelas	
		3	Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap usia sekolah SD dan SMP (7-15 tahun) baik formal maupun nonformal	rasio	
		4	Jumlah daya tampung SD/SMP	orang	
		5	Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal maupun nonformal	rasio	
		6	Jumlah daya tampung SMA/SMK	orang	
		7	Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	%	
		9	Angka kelulusan SD/MI	%	
		10	Angka kelulusan SMP/MTs	%	
		11	Angka kelulusan SMA/MA/SMK	%	
		12	Persentase siswa yang naik kelas	%	
		13	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	%	
		14	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%	
		15	Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/SMK	%	
		1.2	Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan		
1.3	Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KEF1
		16	17		
1.4	Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan	17	persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI	%	
		18	persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs	%	
		19	persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK	%	
1.5	Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja	20	Persentase jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja pada tahun kelulusan	%	
1.6	Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik	21	Sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter	rasio	
1.7	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan	22	Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki		
1.8	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	23	Sekolah yang melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	sekolah	
		24	Persentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah	%	
1.10	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan	25	Persentase sekolah yang memiliki komite sekolah	%	
		26	Perpustakaan Desa	buah	
		27	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	
1.11	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan	28	Pengunjung perpustakaan	orang	
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu					
2.1	Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat	1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	
		2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas	KK	
		3	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	
		4	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KE
2.2	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat	5 Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik 7 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 8 Prevalensi gizi buruk		%	
2.3	Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat	9 Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization</i> 10 cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 11 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		%	
2.4	Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat	12 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin 13 Rasio akseptor KB 14 Cakupan peserta KB aktif		%	
2.5	Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas	16 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 17 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 18 Penanganan korban perdagangan orang 19 Rasio kekerasan dalam rumah tangga		%	
2.6	Meningkatkan kualitas dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	20 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan 21 Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		%	
2.7	Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak			%	
Misi 3 : Meningkatkan daya beli masyarakat					
3.1	Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk industri pertanian yang berdaya saing	1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 3 Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun :		%	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KE
		- Padi	ton	
		- Palawija	ton	
		- Sayuran	ton	
		- Buah-buahan	ton	
4	Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun :			
		- Produk perkebunan	ton	
		- Produktivitas tanaman perkebunan	ton	
		- Produk hhbk	ton	
		- Produksi perikanan budidaya	ton	
		- Produksi daging	ton	
		- Produksi telur	ton	
		- Produksi susu	liter	
5	Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya :			
		- Pertanian	kelompok	
		- Perikanan/peternakan	kelompok	
		- Kehutanan/perkebunan	kelompok	
6	Persentase sawah terairi			
3.2	Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan	8 Regulasi ketahanan pangan	ada/tidak	
		9 Ketersediaan pangan utama	%	
3.3	Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan	10 Jumlah obyek dan daya tarik wisata per tahun	buah	
		11 Jumlah kunjungan wisata	orang	
		12 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	

NO	SASARAN	INDIKATOR	HURUNA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KE
3.4	Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar	16	16	Persentase koperasi aktif	%	
		17	17	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	buah	
3.5	Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna	18	18	Jumlah BPR/LKM aktif	buah	
		19	19	Persentase usaha mikro dan kecil	%	
		20	20	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	
		21	21	Cakupan bina kelompok pedagang	%	
		22	22	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	
3.6	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	23	23	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	
		24	24	Jumlah produk unggulan yang berstandar mutu	buah	
3.7	Terwujudnya iklim investasi yang sehat	25	25	Peningkatan transmigrasi swakarsa	KK	
		27	27	Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja	%	
3.8	Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan	28	28	Jumlah tenaga kerja peserta Jamsostek	orang	
		31	31	Cakupan bina kelompok nelayan	%	
		32	32	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	
3.9	Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur	33	33	pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan	kec	
		34	34	Ketaatan terhadap RTRW	%	
3.10	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	37	37	Persentase berkurangnya penambang liar	%	
		38	38	Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku	%	
		39	39	Persentase jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dokumen LH (amdal, UKL, UPL, SPPJ)	%	
		40	40	RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)	%	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KE
3.11	Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal				
		41	Persentase penanganan sampah	%	
		42	Tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk	%	
		43	Terpeliharanya konservasi kawasan lindung	%	
		44	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kebutuhan dan perkebunan	dokumen	
		45	Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis	%	
		49	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	
		50	Luas kawasan kumuh	%	
		51	Rumah layak huni	%	
		52	Tersedianya database jalan lingkungan dan jalan setapak	kec	
53	Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah	%			
54	Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan	%			
55	Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informatika	%			
56	Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan	%			
57	Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan	%			
58	Persentase cakupan ketersediaan fasilitas	%			
59	Efektivitas pelayanan angkutan	%			
60	Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas	%			
61	Persentase tingkat upaya kelainan keselamatan kendaraan	%			
62	Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas	%			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KE
3.12	Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan	63	Penataan pemukiman muslim dan nonmuslim	ha	
		64	Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan social	m ²	
3.12	Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan	65	Berkurangnya lahan kritis	ha	
		66	Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan	%	
Misi 4 : Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi					
4.1	Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia	1	Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS	Kaupa	
		2	Persentase jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan	%	
		3	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis	%	
4.2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal	4	Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke public	ada/tidak	
		5	Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	31-Jul	
		6	Peningkatan pernyataan opini BPK	WTPP	
		7	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah	%	
		8	Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah	%	
		9	Sertifikasi aset (tanah) milik daerah	%	
		10	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	Milyar Rp	
		11	Terseadinya dokumen RRPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KET
4.3	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	12 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	
		13 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	
		15 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	Milyar Rp	
		16 Ketersediaan pengaturan pembentukan OPD hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat	%	
		17 Kepemilikan KTP	%	
		18 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	rasio	
		19 Kepemilikan kartu keluarga	%	
		20 Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah :	ke	
		- Perda inisiatif	Perda	
		- Perda eksekutif	Perda	
		21 Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang	%	
		22 Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna	%	
		23 Ketersediaan profil desa yang valid	desa/ke	
		24 Kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang otonomi daerah	dokumen	
		25 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif	%	
26 Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	OPD			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BATUAN	KUANTITAS
4.4	Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif	29	Tingkat penyelesaian pelanggaran K-3	kaabah
		30	Rasio personil satpol PP terhadap jumlah penduduk	rasio
4.5	Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi	31	Cakupan OPD yang dapat mengakses jaringan informasi	%
		32	Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi	desa
		33	Pengkajian dan pembangunan Sub Domain <i>website</i> daerah	%
		34	Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi	%
		35	Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi	%
		36	Jumlah kerjasama di bidang HAKI yang dilegislati	MoU
Misi 5 : Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara				
5.1	Terwujudnya pemahaman meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah	1	Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD	temuan
		2	Menurunnya angka perceraian	kasus
		3	Menurunnya jumlah pelanggaran perda	kec
		4	Jumlah penerimaan zakat infaq sodagoh	Rp
		5	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada	%
5.2	Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	6	Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah	ada/tidak
		7	Cakupan petugas linmas	kec
		8	Rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk	%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KE
5.3	Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial	9 Terjaganya ketenteraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum)	lokasi	
		10 Persentase PMKS yang dibina	%	
		11 Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah	buah	
		12 Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS	kelompok	
		13 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya	lembaga	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 20
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETTJEP MUCHTAR SOLEHH